

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENGGUNAAN
IJAZAH PALSU YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA**

(Studi Kasus di Kabupaten Bone)



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Jurusan
Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

HERLIANA

NIIM: 10400114273

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herliana
NIM : 10400114273
Tempat/tgl. Lahir : Sanrangeng, 05 Agustus 1996
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Hukum, Hukum Pidana
Fakultas/Program : Syari'ah Dan Hukum
Alamat : Bone
Judul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah
Palsu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa
(Studi Kasus Kabupaten Bone)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Samata, 24 Maret 2018

ALAUDDIN
M A K A S S A R
Penyusun,

Herliana
Nim: 10400114273

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa (Studi Kasus Kabupaten Bone)” yang disusun oleh saudara/i Herliana, NIM: 10400114273, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis, tanggal 28 Maret 2018 M, bertepatan dengan bertepatan dengan 11 Rajab 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (dengan beberapa perbaikan).



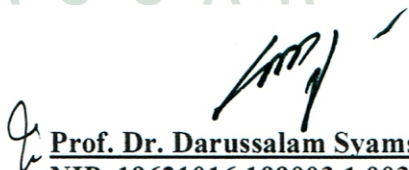
DEWAN PENGUJI

Samata, 28 Maret 2018 M
11 Rajab 1439 H

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (.....)
Sekretaris	: Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. (.....)
Munaqisy I	: Dr. Andi Safriani, S.H.,M.H. (.....)
Munaqisy II	: St. Nurjannah, S.H.,M.H. (.....)
Pembimbing I	: Dr. Hamsir, SH, M.Hum. (.....)
Pembimbing II	: Dr. Fadli Andi Natsif, S.H.,M.H. (.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Syari’ah Dan Hukum,
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Teriring ucapan rasa syukur yang sebesar besarnya kepada hamba- hamba pemilik jiwa dan penguasa hati setiap makhluk Allah SWT yang menciptakan dengan ketulusan kasih sayangnya. Serta shalawat dan salam kepada kekasih-nya Muhammad SAW, Manusia yang hidup dalam kesempurnaan dan realisasi cinta dan karuni-Nya. Dalam salam kemanusiaan kepada semua manusia yang memaknai hidupnya dengan cinta ilahi.

Penulis menyadari bahwa menyusun skripsi ini tidaklah mudah. sebagai manusia biasa dan masih dalam proses pembelajaran, penulis menyadari bahwa karya ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa diterima dengan lapang dada guna penyempurnaan penulisan ini. Banyak kesulitan-kesulitan yang tak terpikirkan sebelumnya terjadi baik bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak juga merupakan bagian terpenting hingga selesainya tulisan ini.

Tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain rasa syukur Alhamdulillah hanya karena Rahman dan Rahimnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi, dengan judul :

“Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Bone)”

Penulis menghanturkan terima kasih yang tak terhingga serta sujud kepada kedua orang tua penulis, ayahanda **H. Abd. Samad** dan Ibunda **Hj. Suryani** yang tercinta sebagai cermin kerendahan hati, keheningan, kesucian dan keberadaannya dalam setiap kebaikan yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan menyekolahkan penulis dari Sd sampai ke tingkat Perguruan Tinggi sehingga penulis meraih gelar Sarjana, penulis juga mengucapkan terima kepada saudara-saudara penulis, kakak tercinta **Hervinawati, Spd** dan adik tersayang **Helviana** yang senantiasa memberikan dukungan moril kepada Penulis.

Secara sadar, penulis mengakui sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat selesai tidak terlepas dengan dedikasi yang tinggi dari berbagai elemen. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih, doa serta rasa hormat yang tulus diberikan pada :

1. **Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.**, Rektor UIN Alauddin Makassar dan segenap jajarannya.
2. **Prof. Dr. Darussalam Syammsuddin, M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum, **Istiqamah, SH., MH.**, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan **Rahman Syamsuddin, SH., MH.**, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Uin Alauddin Makassar.
3. Bapak **Dr. Hamsir, SH, M.Hum.**, selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. Fadli Andi Natsif, SH. MH.**, selaku pembimbing II yang dengan tulus, ikhlas dan penuh kesabaran telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu **Dr. Andi Safriani, SH.MH.**, dan Ibu **St. Nurjannah, SH. MH.**, selaku tim penguji yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk dapat berkenan hadir menguji, mengarahkan dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Terima kasih kepada **Widyastuti S.Psi., M.Si.**, yang telah memberikan informasi serta arahan kepada penulis dalam penelitian.
6. Terima kasih kepada **Polres Kabupaten Bone, Pengadilan Negeri Kabupaten Bone Serta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan** yang telah membantu penulis dalam penelitian.
7. **Seluruh dosen pengajar Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar** yang telah banyak memberikan didikan dan ilmu pengetahuan yang tak ternilai dan tak akan terlupakan sampai kapan pun serta dapat penulis aplikasikan di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja.
8. **Seluruh staf Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar** yang telah banyak memberikan bantuan dan pelayanan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan sampai selesai.
9. Sahabat terbaik penulis **Andi Syamsinar SH**, yang memberikan penglihatan kepada penulis betapa pentingnya pendidikan dan cita-cita untuk menuju suatu tujuan yang ingin dicapai.
10. Sahabat-sahabat terbaik sekaligus saudara terbaik penulis **Nur Aeni, Nur Afiyanti, Andi Nur Sabranah, Siti Sunarti** yang senangtiasa mendukung dan menemani dalam menyusun skripsi penulis.

11. Sahabat terbaik sekaligus teman seperjuangan penulis **Nur Asma, Nur Pratiwi Amir, Sarianti, Sarina, Andi Mutmainnah A. Miri, Muhammad Fauzi Suhar, Yusriansah Dan Muhammad Asrul.**
12. **Saudara-saudariku teman-teman seposko KKN angkatan 57**, kecamatan belopa kelurahan balo-balo.
13. **Saudara-saudariku angkatan 2014**, yang telah banyak mensupport sebagai perjuangan bersama sejak menjadi mahasiswa.
14. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis tuliskan satu persatu dan telah memberika kontribusi berarti dalam penyelesaian studi penulis pada fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri alauddin Makassar.

Atas bantuannya, sekali lagi penulis ucapkan banyak terima kasih. Semoga allah swt menilainya sebagai amal kebaikan dan memberikan imbalan yang semestinya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat diperlukan demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada para pembacanya khususnya bagi. Amin ya rabbal alamin..

Wassalamualaikum wr.wb.

Samata, 23 maret 2018

HERLIANA

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1-7
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penulisan.....	7
E. Kegunaan Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8-51
A. Kriminologi.....	8
1. Pengertian Kriminologi.....	8

2. Ruang Lingkup Kriminologi	10
3. Pengertian Kejahatan	11
4. Teori Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan	21
B. Kejahatan Pemalsuan	23
1. Pengertian Kejahatan Pemalsuan	23
2. Pemalsuan Surat	31
3. Pemalsuan Surat Yang Diperberat	37
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	41
1. Pre-Emitif.....	41
2. Preventif.....	41
3. Represif.....	42
D. Kepala Desa (Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)	
.....	45
1. Pengertian Kepala Desa	45
2. Sistem Pemerintahan Desa.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	52-54
A. Tipe Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	52
C. Jenis Dan Sumber Data	53

D. Teknik Pengumpulan Data	53
E. Teknik Analisis Data	54
BAB IV PEMBAHASAN	55-80
A. Data Dan Dampak Kasus Tindak Pidana Kejahatan Pemalsuan Ijazah Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Bone Tahun 2015-2017	55
1. Data Pemalsuan Ijazah Oleh Kepala Desa Sepanjang Tahun 2015-2017	55
2. Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Kepala Desa	58
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Pemalsuan Ijazah Oleh Kepala Desa	63
1. Faktor Internal	64
2. Faktor Eksternal	66
C. Deteksi Dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Pemalsuan Ijazah Oleh Kepala Desa Dan Pihak Ketiga	70
1. Cara Mendeteksi Palsu Atau Tidaknya Suatu Ijazah	70
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pemalsuan Ijazah Oleh Kepala Desa	71
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pemalsuan Ijazah Terhadap Pihak Ketiga	78

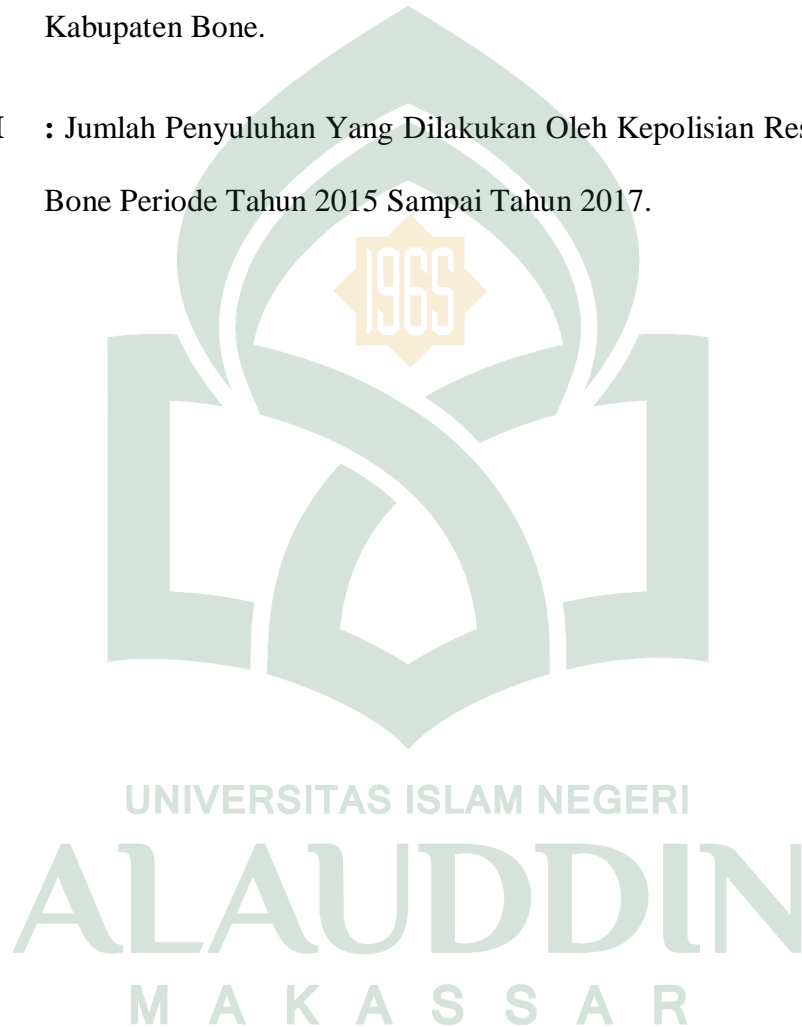
BAB V PENUTUP	81-82
A. Kesimpulan	81
B. Implikasi Penelitian	82
DAFTAR PUSTAKA	83-85



DAFTAR TABEL

Tabel I : Jumlah Laporan (Kesatuan) Kasus Pemalsuan Ijazah Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Dalam Kurun Waktu 2015 Sampai 2017 Pada Polres Kabupaten Bone.

Tabel II : Jumlah Penyuluhan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resort Kabupaten Bone Periode Tahun 2015 Sampai Tahun 2017.



ABSTRAK

Nama: Herliana

Nim: 10400114273

**Judul: Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu
Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Kabupaten Bone)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang dapat ditimbulkan dari penggunaan ijazah palsu oleh kepala desa serta faktor penyebab terjadinya pemalsuan ijazah oleh kepala desa di Kabupaten Bone.

Penelitian ini dilaksanakan 02 Oktober-13 November 2017 di tiga instansi yang berbeda, yakni Polres Kabupaten Bone, Pengadilan Negeri Kabupaten Bone, dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dengan mengambil data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas serta melakukan beberapa wawancara dengan masyarakat Kabupaten Bone. Disamping itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa: Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan ijazah palsu oleh kepala desa yaitu merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Kemudian faktor penyebab terjadinya penggunaan ijazah palsu oleh kepala desa yaitu: Faktor strata sosial serta adanya peluang atau kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum dikalangan masyarakat terutama di desa.¹

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹ Musdalifa R, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu, (Sarjana; Fakultas Hukum, Unhas, 2013), h. 1.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kepala desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.² Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan terhadap ijazah. Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain baik diri sendiri maupun orang lain, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Pemalsuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.³

Kenyataannya sekarang pemalsuan ijazah sudah menjadi penyakit akhlak yang belum ada obatnya, dan itu semua sudah menjangkit di semua jenjang pendidikan. Tidak hanya para peserta didik, namun para guru dan pegawai pun tak luput dari perbuatan curang dalam dunia pendidikan. Ada pula gelar atau ijazah pendidikan yang dipalsukan hanya untuk bisa menjadi pejabat atau melamar kerja.⁴

Ijazah merupakan suatu bukti bagi seseorang dan sebagai suatu syarat bagi seseorang untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.

Untuk mendapatkan ijazah atau gelar dari negara harus sesuai dengan aturan dan Undang-Undang antara lain menurut Pasal 1 Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdinas), Pendidikan merupakan usaha

² Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (1) dan (3) (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014: 43).

³ KUHP, 1946: 1 Pasal 263.

⁴ Musdalifa R, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu, (Sarjana; Fakultas Hukum, Unhas, 2013), h. 1.

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.⁵

Fenomena mengenai ijazah palsu atau membeli gelar sangat menarik untuk dicermati. Dalam penyalahgunaan ijazah, bukan hanya dilakukan oleh pejabat publik, namun dikalangan desa pun merupakan hal yang biasa. Adapun juga yang membeli gelar pendidikan semata-mata agar mendapat status sosial yang lebih tinggi ataupun untuk mendapat pujian, karena dengan gelar banyak yang melekat di namanya maka orang lain akan menganggapnya orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan cerdas.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pemalsuan ijazah ini masuk kedalam pemalsuan surat yaitu pasal 263 KUHP yang mengatur/menentukan:

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu

⁵ Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional), 2003: 20 Pasal 1.

2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.⁶

[illegible]

Para ulama' sepakat bahwa menggunakan ijazah palsu untuk bekerja adalah haram karena mengandung kebohongan, kecurangan dan kebanyakan tidak terlepas dari unsur suap-menyuap. Ini jelas satu hal yang terlarang dalam syari'at dan tidak mungkin dibenarkan menurut hukumnya meskipun pelakunya bermaksud mewujudkan hal yang bermanfaat bagi masyarakat.⁸

59. ⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: C.V Toha Putra, 1989), h.

⁸ Wasiun Mika, Larangan Bersumpah Dengan Nama Selain Allah, [www. SumpahPalsu. Com](http://www.SumpahPalsu.Com) (Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2017).

Sebagaimana contoh kasus pemalsuan ijazah dapat kita lihat pada kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Bone yaitu seorang kepala desa diamankan polisi karena menggunakan ijazah palsu pada saat mencalonkan diri sebagai kepala desa dan baru ketahuan pada saat menjalani periode jabatannya 2015-2019.

Melihat kasus di atas sangat disayangkan padahal Al-Qur'an telah menegaskan dalam QS Al Anfal/8: 27.

[illegible]

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu

⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 7.

mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.¹⁰

Ayat di atas mengaitkan orang-orang beriman dengan amanah atau larangan berkhianat. Bahwa diantara indikator keimanan seseorang adalah sejauh mana dia mampu melaksanakan amanah. Demikian pula sebaliknya bahwa ciri khas orang munafik adalah khianat dan melalaikan amanah-amanahnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Kabupaten Bone)”**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Penelitian ini berfokus kepada bagaimanakah dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pemalsuan ijazah oleh kepala desa dan faktor apakah penyebab terjadinya pemalsuan ijazah oleh kepala desa serta teori-teori yuridis sosiologis dan kriminologis serta fakta kejadian yang ada di masyarakat. Deskripsi fokus dari penelitian ini adalah dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana pemalsuan ijazah oleh kepala desa dan faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan ijazah oleh kepala desa.

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 180.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak pemalsuan ijazah oleh kepala desa di Kabupaten Bone?
2. Faktor apakah penyebab terjadinya pemalsuan ijazah oleh kepala desa di Kabupaten Bone?

D. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak pemalsuan ijazah oleh kepala desa di Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pemalsuan ijazah oleh kepala desa di Kabupaten Bone.

E. Kegunaan Penulisan

1. Sebagai salah satu bahan informasi bagi masyarakat mengenai ilmu pengetahuan khususnya dalam hal ilmu hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah.

2. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Kriminologi*

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹

Beberapa ahli mengemukakan definisi dari kriminologi sebagai berikut:²

- a. Edwin H.Sutherland memberikan definisi tentang kriminologi sebagai kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.
- b. Menurut W.A.Bonger Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- c. G.Constant memberikan definisi Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Cet. 15; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 9.

² Aspriah Arsyad, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Pegawai Negeri Sipil”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Hukum UNHAS, 2014), h. 7.

Dalam kriminologi, hubungan sebab akibat di cari setelah hubungan sebab akibat dalam hukum pidana terbukti, artinya apabila hubungan sebab akibat dalam hukum pidana terbukti, maka hubungan sebab akibat dalam kriminologi dapat dicari, yakni dengan mencari jawaban atas pertanyaan: mengapa seseorang melakukan kejahatan? Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan menggunakan pendekatan sebab akibat ini dapat juga disebut sebagai etiologi kejahatan.³

Objek Kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri. Adapun tujuannya agar menjadi mengerti apa sebab-sebabnya sehingga sampai berbuat jahat itu. Apakah memang bakatnya adalah jahat, ataukah di dorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya (*milieu*) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Ataukah ada sebab-sebab lain. Jika sebab-sebab itu sudah diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak berbuat demikian, atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya.⁴

Obyek kriminologi mencakup tiga hal yaitu perbuatan, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya. Adapun obyek dari ketiganya seperti penjahat yang merupakan perbuatan yang disebut sebagai kejahatan serta pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat merupakan perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan,

³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, h. 11.

⁴ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2009), h. 14.

harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi struktural yang ada dalam masyarakat serta dilihat dari perbuatan maupun pelakunya.⁵

Cara yang dipakai untuk penyelidikan sebab-sebab kejahatan disebut statistik kriminil, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistimatis dari luas kejahatan yang berubah-ubah dan dilihat dalam keseluruhannya dalam macam ragamnya serta perbandingannya dengan gejala-gejala masyarakat yang lainnya.⁶

Tujuan penyelidikan itu ialah untuk memperoleh pengetahuan tentang alat-alat yang berdasarkan ilmu pengetahuan guna membasmi kejahatan (*crimenele politic*).⁷

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi mempunyai ruang lingkup pembahasan mencakup tiga hal pokok, yakni:⁸

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*)
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), dan
- c. Refleksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa

⁵ Bosu, Sendi-Sendi Kriminologi, (Semarang: PT. Usaha Nasional, 1974), h. 16.

⁶ M.L. Hc. Hulsman, Sistem Peradilan Pidana (Cet. 1: Jakarta: CV Rajawali, 1984), h. 24.

⁷ Hartono, Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana (Cet. 1: Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.19.

⁸ A.S. Alam, Pengantar Kriminologi (Makassar: Refleksi, 2010), h. 2.

tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*)

Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran. Sering disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban (*crime is shadow of civilization*) kejahatan adalah bayangan peradaban.

Kejahatan membawa penderitaan/nestapa dan kesengsaraan, mencururkan darah dan air mata. Sehingga kelak kejahatan-kejahatan dan fenomena-fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat teratasi solusinya.

Kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (proses kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (etiologi criminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan (*criminal prevention*).

3. Pengertian Kejahatan

Misdrieff dalam bahasa Belanda. Tindak pidana yang berat lebih berat dari sekedar pelanggaran, perbuatan yang sangat antisosial yang oleh negara dengan sadar menjatuhkan hukuman kepada pelakunya. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis dan sudut pandang sosiologis. Dilihat dari sudut pandang yuridis, menurut R. Soesilo, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan

undang-undang. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.⁹ Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat. Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa perbuatan tidak jahat. Pada umumnya kejahatan merupakan suatu perilaku atau perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran sepenuhnya atas suatu perbuatannya baik buruknya suatu perbuatan apabila melanggar hukum maka perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu perbuatan kejahatan.

Berikut adalah rumusan kejahatan dari berbagai ahli kriminologi:¹⁰

- a. Sue Titus Reid: Kejahatan adalah tindakan sengaja (*omissi*) dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu

⁹ Sudarsono, Kamus Hukum (Cet. 5: Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 222.

¹⁰ Yesmil Anwar, Kriminologi (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h. 179.

kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tersebut. Di samping itu pula harus ada niat jahat (*criminal intent/means rea*)

- b. Sutherland: Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua, bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum. Delik hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Golongan inilah dalam bahasa Inggris disebut *felony*. Ancaman pidana pada golongan ini adalah pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara.

Kejahatan dilihat dari sudut pandang legal di artikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya, suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹¹

Kejahatan yang dilakukan dengan memalsukan surat ataupun semacamnya merupakan perbuatan yang menyimpang serta melanggar hukum dan nilai-nilai kesusilaan, yang dapat merugikan negara dan menipu suatu instansi pemerintah untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan lain tetap merupakan suatu perbuatan yang

¹¹ Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 6.

melawan hukum karena telah dijelaskan bahwa segala perbuatan baik ataupun buruknya apabila melanggar aturan hukum yang telah diatur maka perbuatan tersebut dikatakan suatu kejahatan. Dari kejahatan tersebut akan dikenakan sanksi pidana selama-lamanya enam tahun penjara.

Pengertian kejahatan (*crime*) sangatlah beragam, tidak ada definisi baku yang di dalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara komprehensif.

Ada yang memberikan pengertian kejahatan dilihat dari aspek yuridis, sosiologis, maupun kriminologis.¹²

Munculnya perbedaan dalam mengartikan kejahatan akan sangat beragam, di samping tentunya perumusan kejahatan akan sangat dipengaruhi oleh jenis kejahatan yang akan dirumuskan. Sebagai contoh pengertian kejahatan korporasi (*corporate crime*), jenis kejahatan ini seringkali digunakan dalam berbagai konteks dan penamaan.

Perbuatan melakukan kejahatan dalam islam jelas dilarang karena islam berpandangan bahwa seorang muslim dengan muslim lainnya adalah bersaudara, sehingga tidak sepatutnya ada kebencian yang mengakar dalam diri mereka, permusuhan yang bekepanjangan, dan sifat dengki yang menggerogoti akhlak mereka. Islam adalah rahmat atau dalam bahasa masyhurnya yaitu kasih sayang. Jadi tiada hari tanpa kasih sayang, dan pengamalan kasih sayang tersebut merupakan

¹² Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), h. 55-57.

amalan hingga ajal menjemput. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS Al-Hujurat/49: 10.



*Terjemahnya: “Sesungguhnya orang-orang Mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu, dan bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.*¹³

Oleh sebab itu betapa pentingnya memperhatikan dan menerangkan beberapa ayat quran dan sabda rasul yang berkaitan dengan bahaya dan larangan saling membenci, bermusuhan dan dengki.

a. Kejahatan Dalam Perspektif Yuridis

Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upayanya.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggaran hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Penetapan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif

¹³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 516.

masyarakat atas suatu kejahatan yang diawali oleh para pembentuk undang-undang pidana.¹⁴

Alasan diterimanya definisi yuridis tentang kejahatan ini oleh Hasskel dan Yablonsky adalah:¹⁵

- a. Statistik kejahatan berasal dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang diketahui oleh polisi, yang di pertegas dalam catatan-catatan penahanan dan peradilan serta data-data yang diperoleh dari penahanan orang-orang yang berada dari dalam penjara. Perilaku yang tidak normatif serta perilaku anti-sosial yang tidak melanggar hukum tidak mungkin menjadi bagian catatan apapun.
- b. Tidak ada kesepakatan umum mengenai apa yang dimaksud perilaku anti-sosial.
- c. Tidak ada kesepakatan umum mengenai norma-norma yang pelanggarnya merupakan perilaku non normatif dengan suatu sifat kejahatan (kecuali bagi hukuman pidana).
- d. Hukum menyediakan perlindungan bagi stigmatisasi yang tidak adil. Adalah suatu kesalahan apabila meninggalkan hal ini dalam rangka membuat pengertian kejahatan menjadi lebih inklusif.

¹⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* (Cet. 2: Jakarta: Grafindo Persada, 2013), h. 29.

¹⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, h. 14.

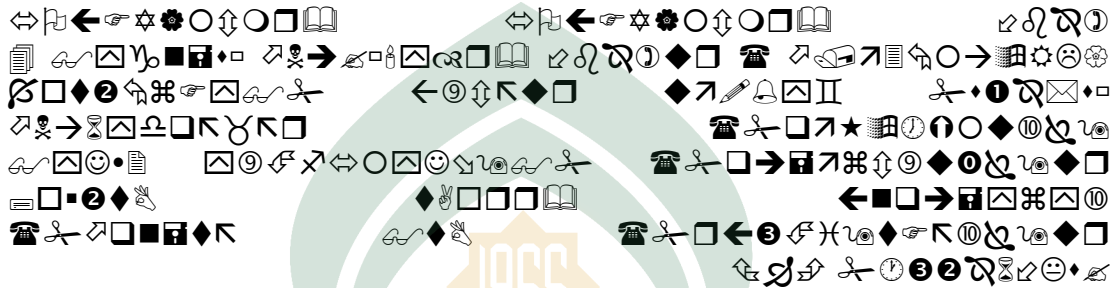
b. Kejahatan Dalam Perspektif Sosiologis

Thorsisten Sellin mengutarakan bahwa pemberian batasan definisi kejahatan secara yuridis itu tidak memenuhi tuntutan-tuntutan keilmuan. Suatu dasar yang lebih baik lagi perkembangan kategori-kategori ilmiah menurutnya adalah dengan memberikan dasar yang lebih baik dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*conductnorms*), karena konsep norma-norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif manapun, serta tidak terkurung oleh batasan-batasan politik dan tidak selalu harus terkandung dalam hukum.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.¹⁶ Berbeda halnya dengan kejahatan yuridis yang terdapat pada aturan-aturan tertulis atau undang-undang, kejahatan sosiologis justru sebaliknya. Meskipun tidak diatur dalam undang-undang tetapi ketika perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang menyimpang maka perbuatan tersebut sudah dianggap sebagai kejahatan.

¹⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, h. 30.

Mengenai kejahatan islam mempunyai pandangan tersendiri bahwa seseorang yang melakukan kejahatan akan merugikan dirinya sendiri sebagaimana firman Allah swt dalam QS Al-Isra'/17: 7.



*Terjemahnya: “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai”.*¹⁷

Ayat di atas mengandung makna bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan maka sebenarnya orang tersebut telah melakukan kejahatan terhadap dirinya sendiri

Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses di mana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang melakukan kejahatan.¹⁸

¹⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 282.

¹⁸ Musdalifa R, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu, h.

Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana bahwa:¹⁹

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²⁰

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Kemudian Moeljatno merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana, antara lain:²¹

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

¹⁹ Aspriah Arsyad, Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Pegawai Negeri Sipil, h. 16.

²⁰ Mahrus Ali, dasar-dasar hukum pidana (Cet. 2; Jakarta: sinar grafika, 2012), h. 1.

²¹ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 103.

Untuk memenuhi hal tersebut maka syarat formil harus ada, karena hanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Syarat materiil juga harus ada, karena perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan, oleh karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

Moeljatno berpendapat, bahwa “kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat”.²²

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP

²² Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, h. 2.

- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

4. Teori Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan

Berdasarkan teori yang penulis peroleh ada beberapa faktor tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu:²³

- a. Teori Tipologis

Teori ini dipelopori oleh Casare Lambrosso (1836-1909), manusia yang pertama adalah penjahat sejak lahirnya. Para penjahat dipandang dari sudut antropologi mempunyai ciri-ciri tertentu. Tengkorak, umpamanya isinya kurang daripada orang lain, terdapat kelainan-kelainan pada tengkoraknya.

²³ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana (Cet. 2: Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 76.

Juga dalam otaknya terdapat keganjilan, yang seakan-akan memperingatkan pada otak hewan biarpun tidak dapat ditunjukkan adanya kelainan-kelainan penjahat yang khusus. Roman mukanya juga lain daripada orang biasa. Tulang rahang yang lebar, muka yang menceng, tulang dahi yang melengkung ke belakang dan lain-lain terdapat padanya. Penjahat umumnya dipandang dari sudut antropologi merupakan suatu jenis manusia tersendiri (*genus homo delinquens*).

b. Teori lingkungan

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah: lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, lingkungan yang memberi contoh dan teladan, lingkungan ekonomi, kemiskinan, dan kesengsaraan.

c. Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka

semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

d. **Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi**

Di era modern seperti sekarang ini, hampir semua lini kehidupan sudah tersentuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditujukan untuk kesejahteraan manusia, diantaranya memberikan kemudahan-kemudahan disegala bidang, dengan biaya yang relative lebih murah dan lebih cepat. Akan tetapi tidak seera merta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak memiliki sisi negatif justru hal ini sering digunakan oleh kelompok atau pihak tertentu untuk memenuhi kepentingannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

B. Kejahatan Pemalsuan

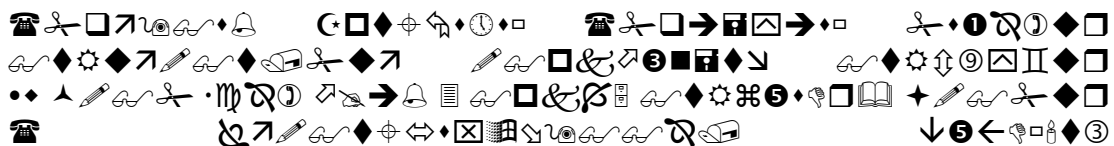
1. Pengertian Kejahatan Pemalsuan

Pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu Nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu pertama kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan. Kedua ketertiban masyarakat yang

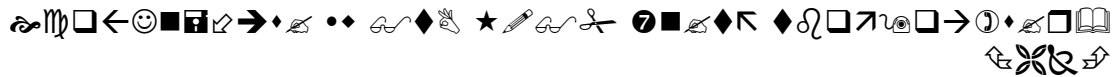
pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban masyarakat.²⁴ Supaya dapat dihukum menurut pasal 263 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.

Suatu keterangan atau pernyataan di dalam tulisan itu dipandang sebagai *intellectuele valsheid* atau suatu pemalsuan intelektual, jika sejak awalnya yang diterangkan atau dinyatakan dalam tulisan tersebut tidaklah benar, ataupun jika orang yang membuat keterangan atau pernyataan di dalam tulisan itu mengetahui atau setidak-tidaknya mengerti bahwa yang ia terangkan atau yang ia nyatakan itu tidaklah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dengan kata lain pemalsuan secara materiil hampir selalu telah dilakukan orang dengan maksud yang jelas yakni untuk menggunakan atau membuat orang lain untuk menggunakan dengan tujuan yang sejelas-jelasnya bahwa yang dilakukannya adalah suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan orang dalam suatu tulisan.

Tindakan ini jelas adalah kebatilan yang nyata, karna Allah tidaklah memerintahkan perbuatan yang keji. Allah swt berfirman dalam QS Al-A'raf/7:28.



²⁴ Junaedi Efendi, dkk., Kamus Istilah Hukum (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 301.



Terjemahnya: “Katakanlah: “Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji”. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?”²⁵

Larangan untuk melakukan perbuatan pemalsuan kembali dipertegas dalam ayat berikut karena dianggap bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan pemalsuan hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah swt sebagaimana firman Allah swt dalam QS An-nahl/16: 105.



Terjemahnya: “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta”²⁶

Maka dari itu apapun alasannya, praktik pemalsuan surat yang mengklaim mampu menghasilkan suatu surat seolah-olah asli merupakan bentuk penipuan, dan ini termasuk perbuatan jâhiliyyah.

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHPidana tentang kejahatan pemalsuan itu dikelompokkan menjadi 4 golongan yakni :

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI) dan

²⁵ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 153.

²⁶ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 279.

4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu :

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Menurut Adami Chazawi, bahwa membuat surat palsu ini dapat berupa :²⁷

- a. Membuat suatu surat yang sebagian atau seluruhnya isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
- b. Membuat sebuah surat yang seolah-olah itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

²⁷ Aspriah Arsyad, Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Pegawai Negeri Sipil, h. 22.

Kejahatan pemalsuan dalam pasal 263 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam rumusan aslinya yaitu:²⁸

- a. Barang siapa yang membuat secara palsu atau memalsukan suatu surat dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang, ataupun yang dimaksud untuk membuktikan sesuatu kenyataan, dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut, maka jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian, karena bersalah melakukan pemalsuan surat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.
- b. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika dari penggunaannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.

Kejahatan pemalsuan surat yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana diatur dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Subjektif : Dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut.

²⁸ R. Soesilo, KUHP, Pasal 263.

- b. Unsur Objektif : Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau suatu surat yang membuktikan suatu kenyataan penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Pemalsuan ijazah sebagai kejahatan, secara kriminologis kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang dan segala aturan-aturan hukum. Sementara penjahat adalah seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.

Dalam kehidupan masyarakat penyalahgunaan ijazah suatu pelanggaran nilai-nilai yang terdapat dalam dunia pendidikan dikarenakan apabila ingin mendapatkan gelar ataupun kedudukan harus melalui prosedur yang sah yang sesuai dengan aturan pemerintah tidak dengan cara mengambil jalan yang cepat dengan memalsukan suatu ijazah untuk mendapat gelar, dalam hal penyalahgunaan ijazah ini sangatlah tidak berpendidikan. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) jenis-jenis perbuatan yang dilarang ini disebut dengan tindak pidana.²⁹

Adapun Undang-Undang dalam Notariatan yang berhubungan dengan pemalsuan ijazah yaitu : Pemalsuan ijazah merupakan salah satu pemalsuan surat otentik dan keterkaitannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 tahun 2004 yaitu terdapat pada otentisitas suatu akta/surat berdasarkan isi atau

²⁹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, h. 14.

keterangan dari surat/akta yang dibuat. Pasal 1 angka 7 UUJN menyatakan : Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dimana, notaris mempunyai kewenangan dan tanggung jawab atas akta/surat yang dibuatnya, sesuai dalam penjelasan pada Bab III Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengenai kewenangan, kewajiban dan larangannya. Faktor yang dapat menyebabkan seorang notaris dapat dijatuhi sanksi pidana berkaitan dengan kewenangan membuat akta seringkali bersinggungan dengan aspek-aspek formal dan bisa dikarenakan penyelewengan pidana (pemalsuan) baik yang tidak disengaja (kurang ketelitian) maupun yang disengaja atau diketahui oleh notaris yang bersangkutan, sehingga sanksi yang dikenakan adalah Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) hanya mengatur tentang sanksi kode etik, perdata dan administratif. Sehingga notaris sebagai pejabat umum apabila melakukan penyimpangan dalam perbuatan akta/surat yang dibuatnya meskipun telah diketahui bahwa identitas tersebut tidak sesuai dengan penghadap, namun akta notaris tetap dibuat dan memasukkan keterangan palsu pada akta/surat yang dibuatnya maka notaris dapat dinyatakan melakukan pemalsuan surat/akta dengan memasukkan keterangan palsu.

Syarat-syarat akta otentik yaitu : Akta otentik menurut pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum

yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang. Maksud dari bentuk yang ditentukan Undang-Undang dalam hal ini adalah bahwa akta tersebut pembuatannya harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (UUJN)
- b. Akta otentik tersebut harus dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum (*openbaar ambtenaar*), kata di “hadapan” menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat “oleh” pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dan lain-lain)
- c. Pejabat yang membuat akta tersebut harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (*bevoegd*) dalam hal ini khususnya yang menyangkut : (1) jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya (2) hari dan tanggal pembuatan akta, dan (3) tempat akta dibuat.

2. Pemalsuan Surat

Di dalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Diadakannya kejahatan pemalsuan surat ditujukan pada perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran akan isi surat.

Surat (*geschrift*) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer computer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.³⁰ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ijazah atau surat pendamping ijazah seperti gelar akademik, transkrip nilai, dan lainnya tergolong dalam bentuk surat yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal itu disebabkan karena ijazah merupakan suatu bukti tulisan yang mengandung buah pikiran tentang hak seseorang dalam mendapatkan kompetensi ilmu yang dipelajarinya dan hak untuk menyandang gelar akademik, oleh sebab itu tindak pidana pemalsuan ijazah dapat digolongkan dalam tindak pidana pemalsuan surat.

Membuat surat palsu (membuat palsu/ *valschelijk opmaaken* sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.

³⁰ Adam Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, h. 99.

Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut:

- a. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectuele valscheheid*);
- b. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele valscheheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Sedangkan perbuatan memalsu (*vervalsen*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.

Ada perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu atau membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh

tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

Tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat yang disebut dengan surat asli. Kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran. Surat yang demikian disebut dengan surat yang dipalsu.

Pemalsuan surat (*valscheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dari Pasal 263 s/d 276, yang bentuk-bentuknya adalah:³¹

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudige valscheid geschriften*) yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valshheid in geschriften*) (Pasal 264)
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268)

³¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan* (Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 98.

5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271)
6. Pemalsuan surat keterangan tentang hak milik (Pasal 274)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)
8. Membuat surat palsu dan memalsu surat Pasal (263 ayat (1))

Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur objektif:

- a. Perbuatannya: 1) membuat palsu dan 2) memalsu
- b. Objeknya:
 - 1) surat yang dapat menimbulkan suatu hak
 - 2) surat yang menimbulkan suatu perikatan
 - 3) surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang
 - 4) surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal.
- c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Unsur subjektif

- a. Memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Membuat sebuah surat yang isi seluruhnya atau isi pada bagian tertentu yang bertentangan dengan kebenaran atau palsu yang disebut dengan pemalsuan

intelektual. Pemalsuan intelektual adalah pemalsuan terhadap isi suratnya. Perbuatan dalam pemalsuan intelektual bisa merupakan perbuatan membuat palsu surat dan juga bisa perbuatan memalsu surat.

a. Kesalahan: Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut, adalah berupa kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud si pembuat membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut ditujukan untuk digunakan olehnya sendiri atau digunakan oleh orang lain.

Dalam membuktikan unsur subjektif kesengajaan yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, ialah:

1. Hubungan sengaja dengan unsur lain dalam rumusan tindak pidana
2. Semua keadaan ketika perbuatan dilakukan
3. Keadaan dan kemampuan jiwa si pembuat ketika berbuat.

b. Sengaja memakai surat palsu dan surat yang dipalsu (pasal 263 ayat (2))

Pasal 263 ayat (2) merumuskan bahwa “diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsu seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

1. Perbuatan memakai

Dalam unsur memakai di sini bukan unsur perbuatan yang dilarang, tetapi merupakan arah yang dituju oleh kehendak atau maksud dalam melakukan perbuatan membuat surat palsu.

Memakai surat adalah perbuatan memanfaatkan kegunaan surat sebagaimana maksud dibuatnya surat itu.

2. Surat palsu atau surat yang dipalsu

Objek tindak pidana dalam ayat (2) ada dua, pertama surat palsu dan kedua yang dipalsu. Persamaan kedua objek surat ini, ialah didalamnya kedua surat tersebut terdapat isi surat yang bertentangan dengan yang sebenarnya.

Surat palsu adalah surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat dalam ayat (1), yang isinya sebagaimana seluruhnya palsu. Sementara surat yang dipalsu adalah surat yang dihasilkan oleh perbuatan memalsu surat dalam ayat (1), yang isinya bertentangan dengan kebenaran.

3. Seolah-olah asli

Unsur seolah-olah asli menandakan bahwa surat yang digunakan itu bukanlah surat yang isinya benar. Tidak benarnya bisa oleh sebab isinya palsu atau isinya dipalsu.

4. Kesalahan: dengan sengaja

Dalam hal mencari arti unsur kesalahan-sengaja yang dicantumkan harus berpedoman pada dua petunjuk di dalam MvT WvS Belanda, ialah:

Pertama: menyatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”

Kedua: MvT juga memberi petunjuk bahwa “cara penempatannya dalam rumusan tindak pidana akan menentukan pengertiannya dalam hubungannya dengan unsur-unsur lainnya, perkataan apa yang ditempatkan sesudah perkataan sengaja akan diliputi olehnya”.

3. Pemalsuan surat yang diperberat

Pasal 264 merumuskan sebagai berikut:

- 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - a) Akta autentik
 - b) Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum
 - c) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai

- d) Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu
 - e) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntuhkan untuk diedarkan.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sesuai atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Kasus yang penulis teliti adalah kasus pemalsuan ijazah dimana pemalsuan ijazah termasuk dalam pemalsuan surat yang diperberat. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undang lain di luar KUHP yang juga mengatur sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yang tertuang dalam pasal 67, pasal 68 dan pasal 69, yakni sebagai berikut:

Pasal 67:

- 1) Perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan /atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun

dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal 68:

- 1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 69:

- 1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan aturan tersebut antara Kitab Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dapat dilihat bahwa dalam undang-undang sistem pendidikan nasional (UU Sisdiknas) ancaman pidana penjara dan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah lebih berat dibandingkan dengan sanksi yang tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Beberapa sanksi hukum juga diterapkan dari berbagai lembaga yang menetapkan beberapa aturan sendiri, seperti lembaga pendidikan, pemerintahan, swasta serta lembaga-lembaga lainnya. Penegakan hukum yang dilakukan bagi

pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah tersebut pada umumnya berupa pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat, atau dikeluarkan dari lembaga tersebut.

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:³²

1. Pre-Emitif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emitif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emitif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emitif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emitif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

³² A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, h. 85.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya terdapat keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “*penal*” dan “*non-penal*”.³³

Untuk menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks terhadap kejahatan pemalsuan diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dikarenakan masalah tindak pidana pemalsuan yang beragam tersebut dipahami melalui sudut pandang tertentu, yang meliputi pengertian, ruang lingkup serta sanksi yang perlu diketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukum pidana yang berupa aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan sebagai hukum positif, namun akan menjadi efektif dan dirasakan dapat mencapai keadilan serta kepastian hukum apabila penerapannya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang tertulis dalam kalimat-kalimat itu. Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “*sosial defence*” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan

³³ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Semarang: PT. Prenada MG, 2010), h. 49.

memperbaiki atau memulihkan kembali si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.

Menurut A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan:³⁴

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Cara bagaimana penyidik, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana, dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*) serta usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini Sudarto mengemukakan penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal yang merupakan bagian dari pembangunan nasional.

³⁴ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, h. 13.

Kebijakan hukum pidana terdapat dua masalah sentral yang harus ditentukan yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar

Masalah sentral pertama umumnya disebut sebagai proses kriminalisasi, sedangkan masalah kedua dikenal dengan proses penalisasi.

Adapun proses kriminalisasi pada umumnya yaitu:

- a. Adanya korban, artinya perbuatan tersebut harus menimbulkan sesuatu yang buruk atau menimbulkan kerugian.
- b. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan
- c. Harus berdasarkan asas *ratio principle*
- d. Adanya kesepakatan sosial

Criminal responsibility atau yang disebut dengan pertanggung jawaban pidana pada dasarnya merupakan implementasi tanggung jawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya.

D. Kepala Desa (Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala desa adalah pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga desa, dan di samping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah.³⁵ Meskipun demikian di dalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri. Dalam membuat peraturan desa, kepala desa harus meminta pendapat masyarakat dalam rapat desa, khususnya mengenai urusan yang menyangkut desa, urusan yang sangat penting, kepala desa wajib berunding dengan rakyat yang berhak memilih Kepala Desa dan orang yang dipandang sesepuh dan menurut adat dipandang terkemuka.

Kepala desa berkedudukan sebagai alat pemerintahan desa dan pelaksanaan pemerintahan diatas desa. Sesuai dengan kedudukan yang dimaksud, kepala desa mempunyai tugas pokok untuk pemerintahan urusan rumah tangga sendiri, menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, dan menumbuhkan serta mengembangkan masyarakat sebagai sendi yang utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut kepala desa mempunyai fungsi untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya, melaksanakan kegiatan dalam rangka

³⁵ UU Desa, 2014: 6 Pasal 1 Ayat 3.

menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka urusan dari pemerintahan lainnya.

2. Sistem Pemerintahan Desa

Berikut penulis menguraikan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa yang terperinci di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 yakni :³⁶

- a. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa mempunyai wewenang:
 1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
 2. Mengajukan rancangan peraturan desa
 3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
 4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APD (Anggaran Pendapatan Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
 5. Membina kehidupan desa
 6. Membina perekonomian desa

³⁶ UU Desa, 2014: 6 Pasal 26.

7. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan pemerintahan Desa, kepala desa mempunyai kewajiban yang lebih terperinci diatur dalam pasal 15 yang berbunyi :

- a. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14, kepala desa mempunyai kewajiban :
 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
 4. Melaksanakan kehidupan demokrasi
 5. Melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
 6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan deasa
 7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
 8. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik

9. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa
 10. Malaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
 11. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
 12. Mengembangkan pendapat masyarakat desa
 13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
 14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, dan
 15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan pemerintahan lingkungan hidup
- b. Selain kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban: Untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat
- c. Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana di maksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun
- d. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD
- e. Menginforamsikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang

f. Laporan sebagaimana di maksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut

g. Laporan akhir masa jabatan kepala desa di sampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat dan kepala BPD.

[illegible]

Mengenai kriteria pemimpin yang jujur dan harus bertanggung jawab kembali tugas dalam QS Al-Anfal/8:27.

³⁷ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 87.

*Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.*³⁸

Kedua ayat di atas menjelaskan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin jika diberi amanah oleh rakyat banyak dan tidak berkhianat atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Untuk menjadi seorang Kepala Desa terlebih dahulu diperlukan suatu persyaratan yang lengkap dan autentik seperti kinerja dalam pekerjaan, ijazah yang digunakan dalam pendidikan yang dimana ijazah tersebut betul-betul asli bukan manipulasi, jika persyaratan tersebut telah melanggar hukum maka kepala desa atau calon kepala desa dapat dikenakan sanksi hukum serta pemberhentian dari jabatannya.³⁹

Menurut Nainggolan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukannya dan besar atau kecilnya perbuatan yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjadi pengurus partai politik

³⁸ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 180.

³⁹ UU Desa, 2014: 6 Pasal 41.

- b. Merangkap Jabatan sebagai Ketua atau Anggota BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa bersangkutan
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD
- d. Tertib dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- g. Menyalahgunakan wewenang ; dan
- h. Melanggar sumpah / janji, serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa.

Apabila seorang Kepala Desa dipidana atau kerungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan (termasuk kejahatan pemalsuan ijaazah), tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka Kepala Desa yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.⁴⁰

⁴⁰ UU Desa, 2014: 6 Pasal 40 (4).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris yang dihasilkan melalui pengamatan penulis dan menggunakan beberapa pendekatan,¹ dimana dengan pendekatan-pendekatan tersebut penulis akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai dampak yang ditimbulkan dari penggunaan ijazah palsu oleh kepala desa di Kabupaten Bone serta faktor penyebab terjadinya pemalsuan ijazah oleh kepala desa di Kabupaten Bone. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan kegiatan penelitian maka harus adanya lokasi penelitian, penulis memilih Polres Kabupaten Bone, Pengadilan Negeri Kabupaten Bone dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Adapun penulis memilih tempat ini dikarenakan sebagai efisiensi dan kemudahan untuk melakukan penelitian. Disamping itu pada lokasi tersebut dianggap tersedia data dan sumber data yang dapat dibutuhkan dalam penelitian ini.

¹ Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), h. 93.

C. Jenis Dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni:²

1. Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari tempat melakukan penelitian dan hasil yang didapat melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini.
2. Data Sekunder adalah sumber-sumber yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data sekunder ialah sejumlah data yang diperoleh dari buku, literature, artikel hukum, dokumen, KUHP serta perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:³

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan wawancara langsung terhadap pelaku dan pihak Reskrim Polres Kabupaten Bone, Pihak Pengadilan Negeri Kabupaten Bone dan Jaksa Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, h. 90.

³ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 40.

2. Studi Pustaka (*Literature Research*)

Penulis mencari sejumlah data yang diperoleh dari buku literatur, artikel hukum, dokumen, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik penyajian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan dijelaskan, dipilih dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan masalah yang diteliti sehingga permasalahan dapat terjawab.⁴ Dengan demikian, penulis akan dapat menarik kesimpulan tentang **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa”**.



⁴ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian*, h. 41.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Data Dan Dampak Kasus Tindak Pidana Kejahatan Pemalsuan Ijazah Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Bone Tahun 2015-2017

1. Data Pemalsuan Ijazah Oleh Kepala Desa Sepanjang Tahun 2015-2017

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada tiga instansi yaitu Polres Kabupaten Bone, Pengadilan Negeri Kabupaten Bone dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, serta wawancara dengan sejumlah masyarakat di Kabupaten Bone maka diperoleh data terkait dengan tindak pidana kejahatan pemalsuan ijazah di Kabupaten Bone. Dengan demikian penulis berharap permasalahan mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dari penggunaan ijazah palsu serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penggunaan ijazah palsu oleh kepala desa dapat terjawab melalui beberapa hasil wawancara penulis dengan pihak Resort Kabupaten Bone, Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Bone, Jaksa pidana umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan serta beberapa masyarakat di Kabupaten Bone. Berikut penulis akan menguraikan data dalam bentuk tabel mengenai jumlah pemalsuan ijazah di Kabupaten Bone dalam kurun waktu 2015-2017.

Tabel 1

Jumlah Laporan Pemalsuan Ijazah Di Polres Kabupaten Bone Tahun 2015 s/d 2017.

No	Tahun	Jumlah Kasus	Selesai
1	2015	3	3
2	2016	5	5
3	2017	6	6
Jumlah		14	14

Sumber Data: Polres Kabupaten Bone

Dari uraian tabel di atas menunjukkan bahwa benar adanya tindak pidana pemalsuan ijazah merupakan delik aduan, karena sejauh ini seperti yang kita ketahui di dalam masyarakat telah banyak terjadi mengenai kasus jual beli ijazah yang merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dalam membuat suatu keterangan palsu atau surat palsu, sehingga dalam kasus pemalsuan ini ada beberapa pihak yang dirugikan sehingga pihak tersebut melakukan gugatan atau aduan kepada pihak yang berwajib.

Pada tahun 2015 terdapat laporan masuk sebanyak 3 kasus, pada tahun 2016 sebanyak 5 kasus, pada tahun 2017 sebanyak 6 kasus. Pada setiap tahunnya terjadinya suatu peningkatan adanya kasus pemalsuan ijazah, yang di mana data tersebut di peroleh di Polres Kabupaten Bone.

Menurut keterangan Basri, S.H. salah satu tim penyidik Polres Kabupaten Bone mengemukakan bahwa:¹

Laporan yang masuk akan diproses setelah adanya 2 alat bukti kemudian melangkah ketahap selanjutnya yaitu pemberkasan (sampai P21) dan dilimpahkan ke kejaksaan, dan kesemua kasus yang berkaitan dengan pemalsuan ijazah telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) termasuk kasus yang menimpa Hj. Fatimah yang sekarang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) (tersangka pemalsuan ijazah oleh kepala desa) yang dijatuhi hukuman penjara 6 (enam) tahun.

Kasus-kasus pemalsuan ijazah yang akhir-akhir ini selalu diberitakan, baik yang dimuat oleh berbagai media baik cetak ataupun elektronik maupun isu-isu yang berkembang di masyarakat, memperlihatkan bahwa fenomena kasus-kasus ijazah palsu ini telah banyak terjadi dan juga berkembangnya sindikat-sindikat pemalsuan ijazah yang dilakukan secara sistematis. Bahkan dalam dunia maya, secara gamblang dan terbuka melalui beberapa situs internet menawarkan pembuatan ijazah palsu untuk semua lembaga pendidikan, khususnya perguruan-perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Sehingga hal tersebut akan memicu siapapun untuk melakukan pemalsuan ijazah.

Pemalsuan suatu ijazah, pelakunya maupun pemberi ijazah/penadah yang secara sengaja memperjual belikan suatu ijazah dapat dijerat dalam sejumlah aturan

¹ Basri, Wawancara Tim Penyidik Pada Polres Kabupaten Bone (4 Oktober 2017).

yang ada, seperti Undang-Undang Pemalsuan Surat-surat, Undang-Undang tersebut dapat diterapkan tergantung siapa yang merasa dirugikan, bila ada seseorang yang misalnya dirugikan maka itu dapat dikenakan Pasal Dalam Undang-Undang Pemalsuan Surat.

2. Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Kepala Desa

Suatu perbuatan pasti mempunyai dampak bagi pelakunya begitupun dengan perbuatan pemalsuan ijazah oleh kepala desa ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tersebut baik dari segi Eksternal maupun Internal. Berikut penulis akan memparkan hasil wawancara penulis dengan Satria S.H., M.H (Jaksa Pidana Umum Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan) dan Nusi (masyarakat desa songe) yang disimpulkan dalam sebuah teori dibawah ini:²

a. Dampak Eksternal

Dari hasil wawancara dengan Muhammad Satria S.H. Jaksa Pidana Umum Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menuturkan bahwa ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari penggunaan ijazah palsu oleh kepala desa diantaranya yaitu:³

² Satria dan Nusi, Wawancara Jaksa Pidana Umum Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Wawancara 13 November 2017) dan Masyarakat Songe (Wawancara Tanggal 17 Maret 2018).

³ Muhammad Satria, Wawancara Jaksa Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (13 November 2017).

1. Di kalangan masyarakat

Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan dengan adanya pemalsuan ijazah tersebut.

2. Sekolah Yang Dipalsukan

Sekolah yang dipalsukan akan memiliki citra yang buruk di tengah masyarakat karena akan diduga telah menerbitkan ijazah palsu.

3. Dari Segi Finansial

Kerugian lainnya yang dapat ditimbulkan dalam pemalsuan ijazah oleh kepala desa antara lain kerugian finansial. Dalam pasal 26 ayat 2 (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa kepala desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Dengan begitu kepala desa tersebut dapat mencairkan anggaran desa, apalagi dalam anggaran desa tersebut ada honor, honor tersebut mengalir ke kepala desa yang bersangkutan. Meskipun pada kenyataannya bahwa ijazah yang digunakan untuk mendaftar sebagai kepala desa adalah ijazah palsu.

Namun beliau tidak menuturkan dampak internal yang dapat ditimbulkan dari adanya penggunaan ijazah palsu oleh kepala desa tersebut. Sehingga berdasarkan penelitian penulis bahwa dampak internal yang dapat ditimbulkan dari adanya penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oleh kepala desa ini adalah sebagai berikut:

b. Dampak Internal

Dampak internal yang dapat ditimbulkan dari penggunaan ijazah palsu oleh kepala desa antara lain:

1. Diberhentikan Dari Jabatannya

Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) pasal 40 ayat 2 (c) yang menegaskan bahwa kepala desa dapat diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi kepala desa atau melanggar larangan sebagai kepala desa. Dengan begitu apabila si kepala desa yang bersangkutan ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah maka si kepala desa yang bersangkutan harus diberhentikan dari jabatannya.

2. Menerima Stigma Buruk Dari Masyarakat

Pelaku atau kepala desa yang bersangkutan harus menerima stigma buruk dari masyarakat sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah.

Menurut pengamatan penulis berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak bahwa dampak yang dapat ditimbulkan dari penggunaan ijazah palsu oleh kepala desa di kalangan masyarakat yaitu merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan dan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap proses penyeleksian kepala desa. Sebab masyarakat akan menganggap bahwa panitia

penyeleksian berkas calon kepala desa kurang jeli dalam menyeleksi berkas calon kepala desa yang sedang mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Kemudian dampak yang ditimbulkan dari penggunaan ijazah palsu bagi kepala desa itu sendiri adalah harus diberhentikan dari jabatannya setelah terbukti melakukan pemalsuan ijazah dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*)

Selain itu penulis akan memaparkan mengenai kategori pemalsuan surat yang terbagi atas tiga yaitu:

1. Membuat Surat Palsu

Membuat surat palsu yaitu membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat.

2. Memalsu Surat

Memalsu surat yaitu sebelum perbuatan ini dilakukan sudah ada surat akan tetapi terhadap isi surat tersebut dilakukan perbuatan memalsu dan menjadikan surat yang sebagian atau seluruh isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran. Dengan cara pelaku menghapus, mengurangi, menambah, maupun merubah angka/kata-kata yang tertera pada surat yang dipalsukannya.

3. Palsu Dari Segi Keadaan

Terhadap sebuah surat yang diterbitkan oleh instansi yang tidak berwenang diputar keadaannya menjadi diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Misalnya sebuah surat dari Departemen Agama kemudian diputar menjadi dari Departemen Hukum Dan Ham (Kumham). Register dan tanda tangan yang tertera sama akan tetapi terhadap keadaannya di ubah seolah surat tersebut diterbitkan oleh Departemen Hukum Dan Ham (Kumham).⁴

Dari ketiga teori di atas apabila dikaitkan dengan pemalsuan ijazah oleh kepala desa sesuai dengan yang penulis tetili, sebagian besar pemalsuan ijazah yang banyak dilakukan oleh kepala desa lebih mengacu pada teori membuat surat palsu yaitu membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Sebelum perbuatan itu dilakukan belum ada surat. Sebagaimana ke empat belas kasus yang penulis teliti sebagian besar kepala desa yang menggunakan ijazah palsu sama sekali tidak pernah mengenyam bangku sekolah dan tidak mempunyai ijazah namun karena adanya beberapa faktor sehingga calon kepala desa yang bersangkutan nekat untuk melakukan pemalsuan ijazah. Yang pada mulanya tidak mempunyai ijazah akan tetapi dengan adanya perbuatan membuat surat palsu tersebut maka terbitlah sebuah ijazah yang seluruh atau sebagian isinya bertentangan dengan kebenaran atau palsu yang sebelum perbuatan tersebut dilakukan belum ada surat.

Dari ketiga pemalsuan surat tersebut yang apabila penggunaannya mendatangkan kerugian maka dapat diancam dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan pasal-pasal yang mengaturnya.

⁴ Muhammad Satria, Wawancara Jaksa Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (13 November 2017).

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Pemalsuan Ijazah Oleh Kepala Desa

Tindak pidana kejahatan pemalsuan ijazah merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang melanggar nilai-nilai hukum, secara kriminologi adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang dan segala aturan-aturan hukum, sementara penjahat adalah seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau Undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.

Pelaku pemalsuan ijazah adalah orang yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan pelanggaran guna mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan melakukan tindakan mencoba memalsukan surat-surat seperti ijazah palsu.

Menurut Basri S.H. seorang penyidik yang menangani sebagian besar kasus pemalsuan ijazah oleh kepala desa di Polres Kabupaten Bone, berdasarkan keterangan saksi baik dari keterangan kerabat maupun keluarga bahwa faktor utama terjadinya pemalsuan ijazah adalah faktor pemenuhan hak, mencari keuntungan dan kemalasan yang terdapat pada diri seseorang untuk meraih suatu gelar dengan cara yang mudah tanpa melalui proses/prosedur yang telah ditetapkan dalam memperoleh suatu ijazah. Serta lemahnya administrasi penyeleksian di tingkat pemilihan kepala desa.⁵

⁵ Basri, Wawancara Tim Penyelidik Polres Kabupaten Bone (04 Oktober 2017).

Menurut pendapat salah satu psikolog Widyastuti S.Psi., M.Si., Psikologi Kriminal dan Dosen fakultas Psikologi UNM Makassar dan Hardjoko S.H. Kasat Reskrim Kabupaten Bone⁶ yang disimpulkan dalam sebuah teori di bawah ini, bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan pemalsuan ijazah khususnya di wilayah Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dalam diri seseorang atau faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang baik atau buruk. Yang termasuk faktor internal yang mempengaruhi seseorang melakukan suatu pemalsuan ijazah yaitu:

a) Faktor Strata Sosial

Dengan adanya strata sosial di lingkungan pelaku maka tindak kejahatan penggunaan ijazah palsu akan mendorong seseorang untuk melakukan pemalsuan ijazah tersebut untuk adanya pengakuan dari lingkungan atau mesyarakat dengan gelar atau status yang disandangnya. Serta tingginya gengsi yang terdapat dalam diri seseorang yang terkadang akan merasa lebih dihormati, dihargai dengan titel yang disandangnya apalagi di lingkungan pelaku yang notabene adalah kampung terpencil.

⁶ Widyastuti dan Hardjoko, Wawancara Psikologi kriminal Dan Kasat Reskrim Kabupaten Bone (04 Oktober & 18 September 2017).

b) Untuk Memenuhi Perekonomian Dan Jabatannya

Dari hasil penelitian penggunaan ijazah palsu kebanyakan yang memakai ijazah palsu adalah orang yang perekonomiannya menengah ke atas, dengan adanya tindak pemalsuan ini akan lebih meningkatkan perekonomiannya dan mensejahterakan kehidupannya ke depan dengan maksud apabila ia memalsukan ijazah akan lebih cepat mempengaruhi kenaikan jabatannya dan akan mempengaruhi perekonomiannya.

c) Pemahaman Agama Yang Kurang

Adapun dalam faktor relegius kurangnya suatu keimanan pada diri seseorang atau rendahnya moral yang ada sehingga dapat terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik yang dapat merusak moral pada diri sendiri dan tidak adanya kesadaran diri untuk belajar dan meraih suatu prestasi dalam suatu pendidikan untuk mencapai hasil/gelar yang diinginkannya dengan kemampuan dirinya sendiri.

Menurut Widyastuti S.Psi., M.Si., Psikologi Kriminal dan Dosen Fakultas Psikologi UNM Makassar ketika mereka masih mempunyai hati nurani atau kuat pada keyakinan spiritualisme meskipun ada tawaran dari berbagai pihak untuk melakukan kejahatan tetapi kapabilitas mereka akan mengatakan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang salah.⁷ Sehingga meskipun faktor strata sosial

⁷ Widyastuti, Wawancara Psikologi kriminal (18 September 2017).

dan perekonomian lebih mendominasi tetapi ketika hati nurani mereka merasa tidak nyaman dengan perbuatan tersebut dan *locus of control*⁸ mereka sudah internal maka mereka tidak akan berbuat jahat.

Jadi berdasarkan hasil penelitian dengan Widyastusi S.Psi., M.Si., Psikologi Kriminal dan Dosen Fakultas Psikologi UNM Makassar beliau lebih menekankan pada aspek spiritualisme. Tetapi meskipun demikian ketiga teori di atas tidak dapat dipisahkan dan saling bercampur baur dalam tindak pidana pemalsuan ijazah.

2. Faktor Eksternal

Namun berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap kepala desa yang menggunakan ijazah palsu bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal diantaranya yaitu:

a) Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selamanya berdampak positif tetapi sebaliknya juga memiliki dampak negatif, apabila digunakan oleh kelompok atau pihak tertentu untuk memenuhi kepentingannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, ijazah yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan tertentu dapat di buat atau ditiru dengan

⁸ Hendry, Locus Of Control (Pusat Kendali), Www.Locus Of Control. Com (Diakses Pada Tanggal 18 September 2017).

mudah, sehingga hampir tidak ada perbedaan antara ijazah asli dan ijazah yang dipalsukan, kecuali dilakukan pengujian tertentu untuk keabsahannya. Bahkan dari penelusuran media internet, penulis menemukan beberapa biro membuat situs secara terbuka yang menawarkan pembuatan ijazah palsu dengan berbagai kombinasi harga dari semua jenjang dan berbagai lembaga pendidikan.

b) Adanya Peluang Atau Kesempatan

Pada umumnya, seseorang melakukan kejahatan karena melihat adanya peluang atau kesempatan yang ada. Dalam hal pemalsuan ijazah, seorang pelaku pemalsuan ijazah tersebut melihat adanya kelemahan-kelemahan dari peraturan-peraturan hukumnya itu sendiri serta sikap tidak peduli atau kurangnya kontrol dari masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai kasus-kasus pemalsuan ini, sehingga dianggap sebagai suatu peluang atau kesempatan bagi pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan belaka dengan memanfaatkan kondisi demikian guna memenuhi kebutuhan dari pihak lainnya dalam hal penggunaan ijazah. Ditambah lagi dengan adanya sarana dan prasarana yang sangat menunjang bagi pihak-pihak pencari keuntungan tersebut dalam hal pembuatan ijazah palsu.

c) Adanya Rekrutmen Instansi Tertentu

Lazimnya, pengumuman penerimaan untuk memenuhi jabatan atau posisi tertentu, mengandung berbagai kriteria dan dibatasi oleh waktu. Beberapa

persyaratan tersebut, justru merupakan dorongan atau pemicu bagi seseorang, karena bila diterima dalam proses rekrutmen tersebut, harapannya akan memberikan kontribusi positif bagi dirinya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya pemalsuan ijazah oleh kepala desa di Kabupaten Bone disebabkan oleh beberapa faktor. Karena itu perlu diadakan penanggulangan agar faktor-faktor itu dapat dicegah dan diatasi.

Adapun upaya penanggulangan kejahatan dengan mekanisme peradilan pidana, dikemukakan oleh Walter C. Reckless yang dijelaskan sebagai berikut:⁹

1. Peningkatan dan pemahaman aparat penegak hukum, yaitu meliputi pemantapan sistem dan organisasi kepolisian yang baik, personil, sarana dan prasarana untuk menuntaskan perkara pidana.
2. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa dan berfungsi untuk menganalisis dan menekan kejahatan dengan mempertimbangkan masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat-syarat, cepat, tepat, murah dan sederhana).

⁹ Dirjosiworo, Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP, (Bandung: CV Mandar Maju, 1976), h.32

4. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat.
5. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

Kejahatan merupakan produk masyarakat. Ia merupakan fenomena sosial yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Kejahatan dapat berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, cara penanggulangan terhadap kejahatan disesuaikan dengan kondisi dalam lingkungan masyarakat sehingga sifatnya relatif serta dapat berlaku secara khusus maupun umum. Kultur budaya serta kebijakan pemerintah turut pula mempengaruhi upaya-upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan ijazah oleh kepala desa.

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas-jelas dilarang. Manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan pemuas diri dan bahkan keinginan untuk mempertahankan status diri hal itu banyak dilakukan tanpa berfikir secara matang yang dapat merugikan lingkungan dan diri sendiri.

Salah satu fenomena yang terjadi adalah masalah pendidikan, dilihat dari segi pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar

dan proses pembelajaran yang aktif, mengembangkan akhlak mulia, serta membentuk watak menjadi penerus bangsa yang baik.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan ijazah palsu dapat dilakukan dengan cara memberikan suatu penyuluhan terhadap masyarakat bagaimana dalam memperoleh suatu gelar atau ijazah dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prosedur pendidikan yaitu dengan bersekolah mulai dari SD sampai Kuliah untuk memperoleh gelar sarjana, dengan kata lain ijazah atau gelar yang diperoleh sesuai dengan peraturan hukum dan pendidikan tanpa adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, memperketat proses penyelaksian terhadap calon kepala desa,serta mempertegas instrument peraturan perundang-undangan kita tentang pemalsuan ijazah.

C. Deteksi Dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Pemalsuan Ijazah Oleh Kepala Desa Dan Pihak Ketiga

1. Cara Mendeteksi Palsu Atau Tidaknya Suatu Ijazah

Cara untuk mengetahui atau mendeteksi palsu atau tidaknya suatu surat palsu yaitu dapat dilihat dari stempel, tanda tangan, beserta kertas atau dokumen surat tersebut karena masing-masing stempel memiliki tekstur yang berbeda walaupun tulisan dan gambar sama.

Adapun caranya yaitu:

- a. Harus mempunyai dokumen stempel asli
- b. Gunakan scanner, software corel draw ataupun photoshop untuk mengetahui stempel itu asli atau palsu

Keaslian atau kepalsuan stempel bukan terletak dari materialnya, tetapi dari legalitasnya. Dari segi material, tidak ada perbedaan sama sekali antara stempel asli dan palsu, kedua-duanya terbuat dari material yang persis sama. Walaupun kita dengan cermat dalam memperhatikan bentuk stempel, gambar stempel secara mata telanjang kita tidak bisa membedakan stempel tersebut karena dapat dikatakan nyaris sempurna itu adalah stempel asli.

Kita hanya bisa membedakan stempel itu asli dari legalitasnya, yaitu keterangan dari lembaga atau organisasi atau perusahaan yang mengeluarkan surat berstempel tersebut. Artinya meminjam istilah semantika dialektik dari dassolennya yaitu benar adanya bahwa stempel itu dibubuhkan oleh lembaga tersebut. Karena secara kasat mata baik stempel asli maupun stempel palsu nyaris persis sama.

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pemalsuan Ijazah Oleh Kepala Desa

Adapun cara penanggulangan pemalsuan ijazah tersebut adalah dalam menghadapi kasus-kasus pemalsuan ijazah, sangat diharapkan partisipasi masyarakat dan tindakan tegas para penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan penyelesaian melalui jalur hukum hingga ke pengadilan. Jika kasus yang melibatkan

oknum pejabat tertentu, sehingga pengusutan dilakukan terkesan lambat dengan berbagai alasan, maka hal itu patut disesalkan dan perlu dilakukan desakan agar segera dilakukan pengusutan sampai tuntas. Tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat mencegah dan mengatasi berbagai kasus pemalsuan ijazah dan gelar.

Dalam upaya-upaya pencegahannya terbagi atas dua yaitu preventif dan represif, antara lain:

1) Upaya preventif

Dengan tidak melupakan istilah “mencegah lebih baik daripada mengobati”, maka upaya penanggulangan kejahatan secara preventif merupakan tahap awal untuk menanggulangi tindak pidana penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oleh kepala desa di Kabupaten Bone. Upaya preventif adalah tindakan pencegahan sebelum melakukan sesuatu yang sifatnya tercela. Dengan kata lain, upaya penanggulangan preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan keadaan di masyarakat yang bersifat pasif dan dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan terarah untuk menjaga atau menghindarkan tindak pidana penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oleh kepala desa di Kabupaten Bone.

Hardjoko S.H., Kasat Reskrim Kabupaten Bone mengemukakan bahwa:¹⁰

Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak kepolisian Resor Kabupaten Bone dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oleh kepala desa adalah:

- a) Melaksanakan penyuluhan, dalam melaksanakan upaya preventif sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oleh kepala desa di Kabupaten Bone, selama ini dilakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya terjadinya tindak pidana, khususnya pemalsuan ijazah oleh kepala desa. Mengingat masyarakat sangat memerlukan informasi mengenai tindak pidana dimana akibat dari perbuatan melawan hukum dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan hukum sangatlah membantu bagi masyarakat dimana informasi yang didapatkan dapat menjadi acuan bagi mereka untuk tidak melakukan tindak pidana serta bagaimana jika mereka mendapatkan tindak pidana di sekitarnya sehingga mereka mengetahui apa yang harus dilakukan.

¹⁰ Hardjoko, Wawancara Kasat Reskrim Polres Kabupaten Bone, (Wawancara Tanggal 04 Oktober 2017).

- b) Meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam penyelidikan serta penegasan pemberian sanksi atau hukuman. Kerjasama ini dilakukan antara kepolisian dan masyarakat.
- c) Melaksanakan razia secara rutin di tempat yang diduga rawan terjadi tindak pidana pemalsuan ijazah. Razia juga dilakukan pada saat ada pendaftaran pemilu dengan bekerjasama dengan panitia desa. Upaya razia yang dilakukan Kepolisian Resor Kabupaten Bone dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana pemalsuan ijazah.

Pelaksanaan peran pemerintah dalam hal ini adalah aparat penegak hukum terutama Kepolisian Resort Kabupaten Bone dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat di kabupaten bone agar tidak melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana pemalsuan ijazah. Dengan demikian Kepolisian Resor Kabupaten Bone melakukan penyuluhan-penyuluhan diberbagai tempat di Kabupaten Bone. Untuk lebih jelasnya, maka penulis menguraikan bentuk-bentuk penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kabupaten Bone dalam rangka memberikan pengetahuan mengenai hukum bagi masyarakat, adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Bone selama Periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017.

No	Tahun	Jumlah penyuluhan	keterangan
1	2015	25	Banyak dilakukan di sekolah-sekolah, pihak Kepolisian biasanya bekerja sama dengan pihak LSM dan Mahasiswa yang melakukan KKN di Kabupaten Bone.
2	2016	32	
3	2017	40	

Sumber Data: Polres Kabupaten Bone, tahun 2015-2017.

Berdasarkan tabel di atas, maka tampak dengan jelas bahwa selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 di Kabupaten Bone, pihak Kepolisian Resor Kabupaten Bone melakukan penyuluhan di masyarakat dan sekolah-sekolah adalah sebanyak 97 kali, dengan perincian selama tahun 2015 pihak Kepolisian Resor Kabupaten Bone melakukan penyuluhan sebanyak 25 kali dengan bekerja sama dengan pihak LSM dan pihak mahasiswa yang melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Kabupaten Bone. Pada tahun 2016 pihak Kepolisian Resor Kabupaten Bone melakukan penyuluhan sebanyak 32 kali dan pada tahun 2017 sebanyak 40 kali, hal

ini berarti pelaksanaan kegiatan penyuluhan dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat Kabupaten Bone mengalami peningkatan.

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 pihak Kepolisian Resor Kabupaten Bone melakukan penyuluhan dalam rangka menanamkan pemahaman dan pengetahuan hukum terhadap masyarakat di Kabupaten Bone dilakukan sebanyak 97 kali. Hal ini menggambarkan bahwa pihak Kepolisian Resor Kabupaten Bone sering melakukan penyuluhan terhadap masyarakat.

Selanjutnya Hardjoko S.H. menegaskan bahwa:¹¹

Pihak Kepolisian Resor Kabupaten Bone melakukan razia dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat di Kabupaten Bone terutama dalam hal terjadinya tindak pidana pemalsuan ijazah. Dilakukan setiap minggu atau saat ada pendaftaran pemilu dengan memeriksa setiap berkas-berkas yang masuk terutama yang berkaitan dengan ijazah yang terdapat pada panitia pemilihan kepala desa. Dengan diadakannya kegiatan razia tersebut, maka diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, khususnya tindak pidana pemalsuan ijazah oleh kepala desa.

¹¹ Hardjoko, Wawancara Kasat Reskrim Kabupaten Bone (04 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka nampak bahwa Kepolisian Resor Kabupaten Bone sering melakukan razia dalam rangka melakukan upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana penggunaan ijazah palsu. Kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Bone bukan upaya represif, namun merupakan usaha preventif atau pencegahan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Bone agar memiliki kesadaran hukum yang baik sehingga tidak melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana pemalsuan ijazah.

2) Upaya Represif

Seiring dengan pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah yang bersifat preventif, maka perlu dilaksanakan upaya penanggulangan bersifat represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Menurut keterangan Hardjoko S.H. Kasat Reskrim Polres Kabupaten Bone mengatakan bahwa:¹²

Tindakan yang dilakukan apabila ada pelaku kejahatan tertangkap atau ketahuan memalsukan ijazah yang disertai dengan dua alat bukti adalah melakukan tindakan penahanan. Dan persoalannya akan dilimpahkan ke kejaksaan.

¹² Hardjoko, Wawancara Kasat Reskrim Polres Kabupaten Bone (04 Oktober 2017)

Sejalan dengan pendapat Hardjoko S.H. Kasat Reskrim Polres Kabupaten Bone, penulis berpendapat bahwa sudah seharusnya pihak polres kabupaten bone melakukan berbagai upaya dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah yang hendaknya dilakukan secara dinamis dan komprehensif melalui berbagai upaya, baik yang bersifat represif maupun yang bersifat preventif. Dengan demikian upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah ditempuh dengan menggunakan sarana penal (penumpasan setelah terjadinya kejahatan) dan sarana non penal (pencegahan kejahatan).

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pemalsuan Ijazah Terhadap Pihak Ketiga

Dalam proses penegakan hukum terkadang yang menjadi titik fokus para penegak hanya pelaku yang terlibat secara langsung namun tidak menyelidiki pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung. Disini penulis akan memaparkan upaya penanggulangan kejahatan terhadap pihak ketiga atau pihak yang turut melakukan penyertaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

1. Orang yang melakukan (*Dader*)
2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenplegen*)
3. Orang yang turut melakukan (*Mededader*)
4. Orang yang sengaja membujuk (*Uitlokken*)

Menurut pendapat penulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa pihak ketiga yang terlibat dalam proses pemalsuan ijazah dalam hal penerbit ijazah palsu tersebut termasuk dalam kategori penyertaan (orang turut melakukan/*mededader*) sehingga dapat dikenai sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan ijazah terhadap pihak ketiga diantaranya yaitu:

1) Upaya Preventif

Upaya preventif yang dilakukan dalam kasus tindak pidana pemalsuan ijazah oleh kepala desa terhadap pihak ketiga yaitu dari pihak cyber Polres Kabupaten Bone melakukan pemblokiran terhadap situs-situs di internet yang menawarkan jasa pembuatan ijazah palsu.

2) Upaya Represif

Upaya represif yang dilakukan dalam kasus tindak pidana pemalsuan ijazah oleh kepala desa terhadap pihak ketiga yaitu memberikan sanksi yang sesuai dengan undang-undang yang agar dapat memberi efek jera kepada pelaku pihak ketiga.

Terlepas dari hal tersebut, mengenai persyaratan menjadi kepala desa apakah dipermudah saja dengan melihat kapasitas si calon kepala desa tentu membutuhkan diskusi yang lebih mendalam. Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa seharusnya diadakan ujian kompetensi untuk mengetahui

kapabilitas si calon kepala desa apakah layak untuk menjadi kepala desa atau tidak. Dengan demikian proses tersebut lebih efektif dan efisien dan tidak hanya mengacu pada syarat formal saja seperti mengharuskan adanya ijazah SMP.

Namun demikian terhadap seorang kepala desa yang diketahui menggunakan ijazah palsu pada saat menjalani masa pemerintahannya sebaiknya diberhentikan dari posisinya sebagai kepala desa.¹³

Dengan demikian maka uraian dan pembahasan yang dipaparkan penulis di atas, dapatlah penulis memberikan pendapat bahwa terjadinya tindak pidana pemalsuan ijazah bukan hanya disebabkan oleh faktor strata sosial, ekonomi dan spiritualisme, tetapi juga disebabkan oleh lemahnya sistem administrasi penyeleksian pada tingkat pemilihan kepala desa. Tindakan pemalsuan yang terjadi terhadap suatu ijazah adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang kepada pelakunya harus dikenakan sanksi yang seleyaknya atau sewajarnya.

¹³ UU Desa, 2014: 6 Pasal 40 (4).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Dampak yang ditimbulkan dari adanya pemalsuan ijazah oleh kepala desa berupa dampak eksternal dan dampak internal. Untuk dampak eksternal yang ditimbulkan dari adanya penggunaan ijazah palsu oleh kepala desa yaitu merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan, sekolah yang dipalsukan, dan juga berdampak pada segi finansial. Mengenai dampak internal yaitu diberhentikan dari jabatannya serta kepala desa yang bersangkutan harus menerima stigma buruk dari masyarakat.
2. Mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan ijazah oleh kepala desa di Kabupeten Bone disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab terjadinya pemalsuan ijazah oleh kepala desa yaitu faktor strata sosial, untuk memenuhi perekonomian dan jabatannya,serta pemahaman agama yang kurang. Dari segi eksternal yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adanya peluang atau kesempatan,serta adanya rekrutmen dari instansi tertentu.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat di atas, maka ada beberapa implikasi penelitian yang dapat penulis kemukakan, yaitu:

1. Agar tidak terjadi tindak pidana pemalsuan ijazah di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Bone yang lebih luas maka dibutuhkan kesadaran dari masyarakat bagaimana dalam memperoleh sesuatu seperti ijazah atau gelar dengan cara yang sesuai dengan prosedur pendidikan.
2. Hendaknya pengawasan terhadap para calon kepala desa terus ditingkatkan agar tidak ada lagi pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan suatu perbuatan melanggar hukum seperti kejahatan pemalsuan ijazah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

Alam, A.S. Pengantar Kriminologi, Makassar: Refleksi, 2010.

Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: sinar grafika, 2012.

Anwar, Yesmil. Kriminologi, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana. Semarang: PT. Prenada MG, 2010.

Arsyad, Aspriah. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Pegawai Negeri Sipil. Makassar: Skripsi Fakultas Hukum UNHAS, 2014.

Bosu, Sendi-Sendi Kriminologi, Semarang: PT. Usaha Nasional, 1974.

Chazawi, Adami. Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Chazawi, Adami. Percobaan dan Penyertaan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: C.V Toha Putra, 1989.

Efendi, Junaedi dkk. Kamus Istilah Hukum, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

- Effendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Hartono, Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hiariej, Eddy O.S. Teori Dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hulsman, M.L. Hc. Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: CV Rajawali, 1984.
- Mansur, Didik M. Arief dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.
- Mantra, Ida Bagoes. Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2007.
- Maramis, Frans. Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia, Jakarta: Grafindo
Persada, 2013.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2009.
- R, Musdalifa. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu,
Makassar: skripsi Fakultas Hukum, Unhas, 2013.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. Kriminologi . Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti. Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Suryabrata, Sumadi. Metode Penelitian, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.

Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946.

Republik Indonesia, Undang-Undang Desa nomor 6 Tahun 2014.

Republik Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004.

Republik Indonesia, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

Sumber Lain

Mika, Wasiun. “Larangan Bersumpah Dengan Nama Selain Allah”. [www. Sumpah Palsu. Com](http://www.SumpahPalsu.Com) (10 Juni 2017).

Hendry. “Locus Of Control (Pusat Kendali)”. [www.Locus Of Control. Com](http://www.LocusOfControl.Com) (18 September 2017).